

# Dampak disahkannya Konvensi Cafe Town 2007 terhadap pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha (Leasing) pesawat udara di Indonesia / Enny Purnomo Ahyani

Enny Purnomo Ahyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269571&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Konvensi Cape Town 2001 yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2007 bertujuan membentuk suatu perangkat hukum yang berlaku diantara negara peserta atas benda-benda bergerak pada umumnya dan terhadap pesawat udara, helikopter dan peralatan bergerak yang berhubungan dengannya. Tingginya biaya pengangkutan udara di Indonesia disebabkan besarnya biaya pengadaan pesawat udara sebagai akibat besarnya resiko yang ditanggung kreditur, lessor atau penjual dalam hal debitur, lessee atau pembeli cidera janji diantaranya kendala dalam melaksanakan penghapusan tanda daftar dan kebangsaan serta ekspor pesawat udara. Resiko tersebut pada umumnya dialihkan kepada perusahaan asuransi yang biayanya menjadi beban debitur, lessee atau pembeli pesawat udara dan sebagai akibatnya debitur, lessee Indonesia sebelum diratifikasinya Konvensi Cape Town 2001 hanya mampu melakukan sewa guna usaha atas pesawat udara yang lama atau tidak baru. Penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan meneliti sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan metode deskripsi analitis dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang menjadi kendala praktek pelaksanaan hak-hak kreditur, lessor dan penjual dalam hal debitur, lessee atau pembeli cidera janji khususnya dalam proses penghapusan tanda daftar dan kebangsaan serta ekspor pesawat udara yang pernah dioperasikan oleh PT Air Paradise dan PT Efata Papua Airlines. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan yang berlaku saat ini memungkinkan pihak Perhubungan Udara tidak mengabulkan permohonan penghapusan tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang tidak diajukan oleh operator/lessee, meskipun untuk itu lessor/pemilik terdaftar bertindak untuk dan atas nama operator/lessee berdasarkan surat kuasa yang dibuat sebelumnya. Ratifikasi terhadap Konvensi Cape Town 2001 akan

memberi kepastian hukum bagi kreditur, lessor atau penjual untuk melaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak debitur, lessee atau pembeli diantaranya dapat dicatatkannya hak kebendaan atas kepentingan internasional (International Interest) pada pencatatan internasional (International Registry) serta terjaminnya hak untuk melaksanakan penghapusan tanda daftar dan kebangsaan pesawat udara dan mengekspornya dalam hal debitur, lessee atau pembeli cidera janji.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The Cape Town Convention 2001, which was ratified pursuant to Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 8 of the year 2007 is intended to establish a set of rules which will apply amongst the members in relation to movable goods in general and on aircraft, helicopters and other moveable equipment in relation thereto. The high cost for air transportation in Indonesia has been in part caused by the high cost of aircraft procurement due to the risk borne by creditors, lessors or sellers in the case the lessees or purchasers default, including among others, the constraint to proceed with the deregistration of the registration mark and nationality as well as exportation of aircraft. Such risk is usually taken on by insurance companies which cost shall be born by the debtors, lessees or purchasers of an aircraft and consequently, debtors or Indonesian lessees before the ratification of the Cape Town Convention 2001 could only lease not a new aircraft. This thesis has the character of normative law by analyzing the synchronization of the prevailing laws and regulations and using the methodology of descriptive analysis by analyzing the legal aspects which restrict the practice of implementing the rights of the creditors, lessors and sellers in the event the debtors, lessees or purchasers are in default, particularly in the case of the deregistration and export process of aircraft which were operated by PT Air Paradise and PT Efata Papua Airlines. From this analysis, it can be concluded that the prevailing regulations enable the Air Authority to reject a deregistration request which is not made by the operators/lessors, even though the lessors/registered owners are acting for and on behalf of

the operator/lessee by virtue of a power of attorney made earlier. The ratification of the Cape Town Convention 2001 shall give legal certainty to creditors, lessors or sellers to implement their rights arising from an agreement legally entered into between the parties, among others, the registration of International Interest at the International Registry, legal certainty on the right to apply for deregistration of the aircraft from the aircraft registry and legal certainty to apply for exportation.